



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2026

BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 dapat diselesaikan. Penyusunan dokumen ini merupakan amanat Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat Renja, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026.

Renja ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan program di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Rejang Lebong dalam menyusun prioritas-prioritas program dan kegiatan pada Tahun 2026, sehingga sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dapat tercapai sesuai target perencanaan.

Renja Bappeda Tahun 2026 disusun dengan mempedomani Renstra Bappeda Tahun 2025-2029, RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 serta memperhatikan hasil evaluasi capaian Renja Bappeda tahun lalu dan tahun berjalan. Secara garis besar, program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun dalam Renja Bappeda Tahun 2026 ditujukan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran strategis Bappeda.

Selanjutnya, Renja Bappeda Tahun 2026 akan menjadi langkah awal dalam penyusunan anggaran tahun 2026 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Anggaran Bappeda Tahun 2026. Semoga segala upaya yang tertuang dalam Renja Bappeda Tahun 2026 mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT demi Kabupaten Rejang Lebong yang lebih baik.

Curup, Juli 2025

Plt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN REJANG LEBONG



AFREDA ROTUA PURBA, S.Hut., M.Ling
Bendahara TK I
NIP. 19700430 200212 2 002

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika	6
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.....	22
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.....	27
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	40
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong	43
3.3 Program dan Kegiatan.....	44
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG	
	57
BAB V PENUTUP	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan outcome yang ingin di wujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 merupakan penjabaran dari pelaksanaan kegiatan yang berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026.

Penyusunan Renja pada Bappeda Kabupaten Rejang Lebong ini adalah untuk memberikan gambaran tentang arah dan sasaran program kegiatan guna menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah serta RKPD, dan juga untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat daerah dilakukan dengan mempertimbangkan optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Diharapkan Renja ini menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dengan tetap mempertimbangkan prioritas-prioritas program/kegiatan/subkegiatan serta pengendalian pelaksanaannya.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya di singkat Rencana Kerja Perangkat Daerah terbagi dalam tiga fase, yakni Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Akhir Renja Perangkat daerah kemudian ditetapkan menjadi:

- a. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah merupakan draft awal sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah pada tahun n
- b. Selanjutnya rancangan awal Renja disempurnakan berdasarkan surat edaran Bupati Rejang Lebong menjadi rancangan Renja. Rancangan Renja dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah dan sebagai bahan dalam

penyusunan Rancangan RKPD yang akan dibahas dalam musrenbang tingkat desa.

- c. Hasil Musrenbang menjadi dasar penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD selanjutnya Peraturan Bupati tentang RKPD menjadi dasar dalam menyempurnakan Rancangan Renja menjadi Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
- d. Rancangan Akhir Renja seluruh Perangkat Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tentang Renja Perangkat Daerah.

Seluruh tahapan proses merupakan implementasi perencanaan secara partisipatif dengan pendekatan teknokratik, buttom up, top down dan politis

Penyusunan Renja didasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan
2. Penyusunan Rancangan awal
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas perangkat daerah
5. Perumusan rancangan akhir, dan
6. Penetapan

Gambar 1.1

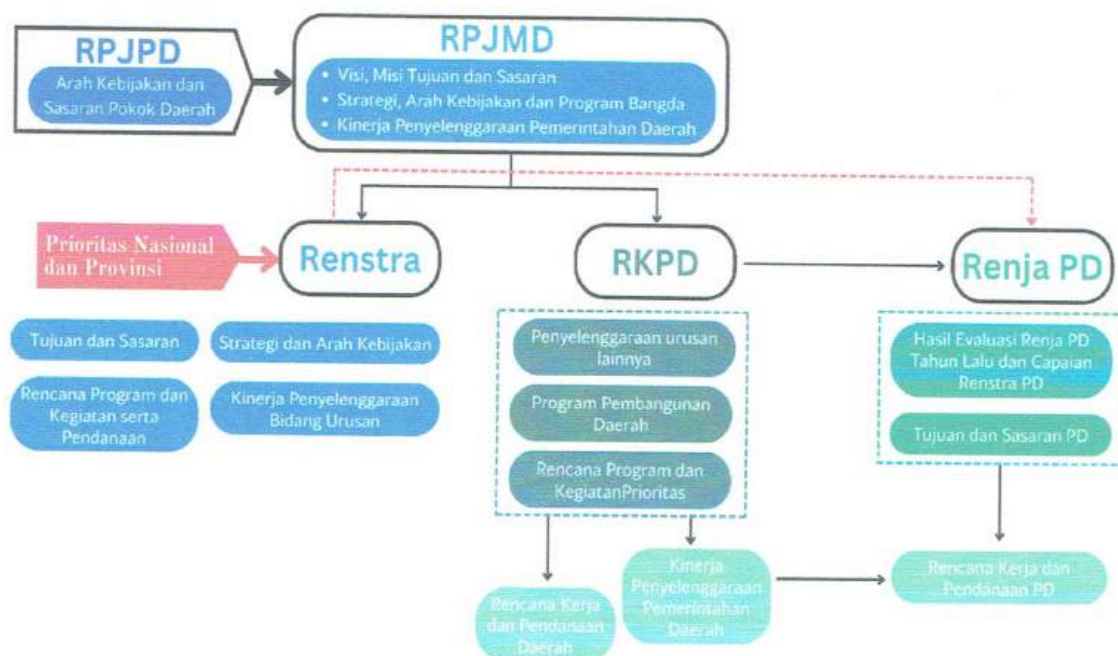
Tahapan Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong



Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 adalah penjabaran dari Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 serta mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2030.

Gambar 1.2

Keterkaitan dokumen Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah



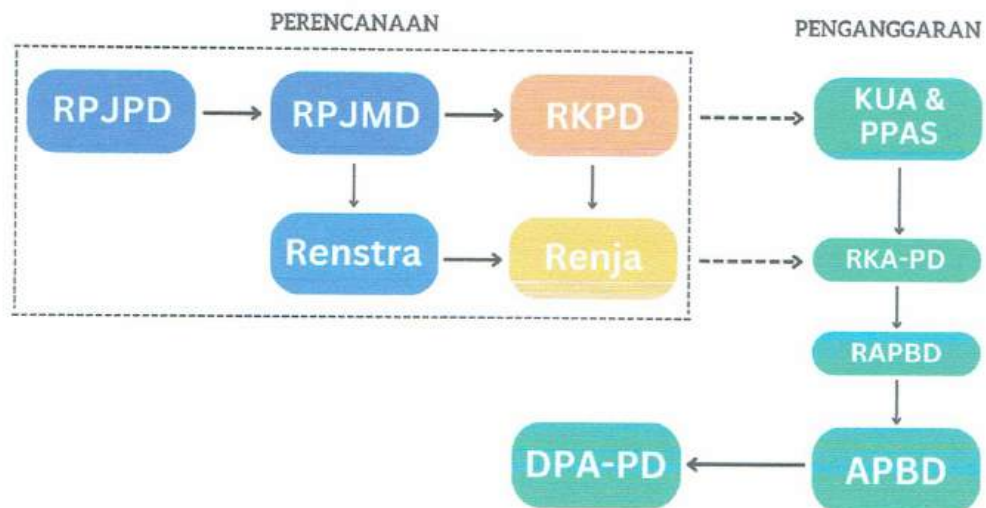
Keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lain seperti RKPD dan Renstra sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena Renja merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan yang ada di atasnya seperti RKPD, Renstra dan RPJMD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Secara sistematis, Renja Perangkat Daerah memuat kondisi ideal yang seharusnya diciptakan dengan disertai penjabaran mengenai cara pencapaiannya. Dengan demikian, substansi yang dimuat dalam Renja Perangkat Daerah dapat memberikan gambaran konkrit terkait pengukuran target capaian kinerja dalam setiap pentahapan pembangunan daerah. Kesenambungan dan keselarasan antara program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten, menjadi tolak ukur dan menjadi tantangan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026. Dengan demikian keberadaan dokumen Rencana Kerja (Renja) mempunyai peranan penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan, proyeksi anggaran, dan menyelesaikan target-target yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Renja Perangkat daerah juga memiliki hubungan tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD. Berikut merupakan gambaran dari tindak lanjut Renja dalam proses

penyusunan RAPBD. Berikut merupakan gambaran dari tindak lanjut Renja dalam proses penyusunan RAPBD pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3
Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD



Berdasarkan uraian gambar di atas, Renja Perangkat Daerah ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), karena Renja Tahun 2026 merupakan acuan bagi perangkat daerah untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKA Tahun Anggaran 2026, sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Bappeda Tahun 2026 antara lain:

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah.
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
 - h. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2026.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2026 adalah Untuk mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, sebagai pedoman untuk merumuskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam perangkat daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

Sementara tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah tahun 2026 adalah untuk

- a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif Tahun 2026.
- b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2026.

1.4. Sistematika

Sistematika Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2026, mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Ranwal Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

1.3 Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terdapat

pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat daerah dan formulasi isu-isu penting berupaya rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

1.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun Perangkat daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dan penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan)

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan.

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG

Menjelaskan perumusan kegiatan prioritas tahun 2026, kegiatan antar Perangkat Daerah Provinsi, serta rencana pendanaan berdasarkan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong 2024 dan Capaian Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan/ permasalahan yang dihadapi. Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong yang didasarkan pada Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029.

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2026 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional yang tertuang dalam Renstra Bappeda. Keberhasilan perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan.

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada tahun 2024 sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026 yang menjadi tugas Bappeda meliputi 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan. Total alokasi anggaran sebesar Rp. 7.826.983.522,-, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2024

Uraian	Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.241.883.384
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.230.700
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	22.609.900

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.620.800
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.338.161.211
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.070.633.211
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	267.528.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	374.373.320
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.480.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.298.020
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.081.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.287.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.685.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.480.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208.060.800
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	155.101.153
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	126.441.153
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.660.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	328.017.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	131.297.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor Dan Bangunan Lainnya	196.720.000
Program Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	1.829.495.165
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.577.921.965
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	317.606.268
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.260.315.697
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	133.982.500
Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	133.982.500

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	117.590.700
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	117.590.700
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	495.415.318
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	162.337.400
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	162.337.400
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	164.452.100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	164.452.100
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	168.625.818
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	168.625.818
Program Penelitian dan Pengembangan	260.189.655
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	260.189.655
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	125.012.000
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	135.177.655

Secara umum realisasi capaian program dan kegiatan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat realisasi capaian program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Tidak terdapat Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Realisasi Program/Kegiatan yang sesuai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

Tabel 2.2

Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

Program/Kegiatan	Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Capaian Renstra
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN		
Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	1. Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah yang mencapai 100% sesuai target 2. Komitmen dari para pimpinan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong	Pelayanan Perangkat Daerah dapat sesuai target untuk mendukung capaian dari Renstra
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang mencapai 100% sesuai dengan target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat daerah yang mencapai 100% sesuai dengan target yaitu 100%	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Persentase laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mencapai 100% sesuai dengan target yaitu 100%	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Persentase laporan	Persentase laporan pelaksanaan	Kegiatan pelayanan

pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang mencapai 100% sesuai dengan target yaitu 100%	administrasi umum perangkat daerah dapat terpenuhi
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Persentase laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang mencapai 100% sesuai dengan target yaitu 100%	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang dapat terpenuhi
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Persentase laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mencapai 100% sesuai dengan target yaitu 100%	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mencapai 100% sesuai dengan target yaitu 100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang terlaksana dengan baik
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN		
Persentase dokumen perencanaan, evaluasi, dan analisis data pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan analisis data pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan mencapai 100% sesuai dengan target	Dokumen perencanaan, evaluasi, dan analisis data pembangunan dapat tersusun sesuai peraturan perundang-undangan
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah ditetapkan sesuai aturan perundangan	Peningkatan koordinasi antar sektor, stakeholders baik pemerintah maupun swasta, antara pusat dan daerah serta pelibatan	Dokumen perencanaan tersusun sesuai aturan perundang-

	masyarakat, akademisi, dll	undangan
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
Persentase dokumen analisa data dan informasi pembangunan daerah	Persentase dokumen analisa data dan informasi pembangunan daerah yang mencapai 100% sesuai dengan target yaitu 100%	Dokumen analisa data dan informasi pembangunan daerah dapat terselesaikan
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
Persentase dokumen evaluasi pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundang-undangan	Persentase dokumen evaluasi pembangunan daerah yang mencapai 100% sesuai dengan target yaitu 100%	Dokumen evaluasi pembangunan daerah tersusun sesuai aturan perundang-undangan
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Persentase keselarasan, dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan lintas sektor	Pelaksanaan pendampingan strategis pada tema tata kelola, ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia	Sasaran perencanaan pembangunan lintas sektor dapat berjalan dengan selaras
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran pembangunan lintas sektor lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	1. Peningkatan koordinasi dengan stakeholders terkait, akademisi, masyarakat, dll. 2. Harmonisasi dengan aturan – aturan pusat yaitu berupa kegiatan pertemuan, FGD dan konsultasi 3. Kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lingkup .Bidang Perekonomian dan SDA 4. Dilaksanakan FGD dan	Sasaran pembangunan lintas sektor lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dapat berjalan dengan selaras

	koordinasi lintas OPD dan satkeholders terkait sektor perencanaan	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran pembangunan lintas sektor lingkup bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam)	1. Peningkatan koordinasi dengan stakeholders terkait, akademisi, masyarakat, dll. 2. Harmonisasi dengan aturan – aturan pusat yaitu berupa kegiatan pertemuan, FGD dan konsultasi 3. Kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lingkup .Bidang Perekonomian dan SDA 4. Dilaksanakan FGD dan koordinasi lintas OPD dan Stakeholders terkait sektor perencanaan	1. Sasaran pembangunan lintas sektor lingkup bidang perekonomian dan SDA dapat berjalan dengan selaras 2. Dokumen perencanaan lingkup bidang perekonomian dan SDA dapat tersusun dengan baik
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
Persentase keselarasan dan ketercapain sasaran pembangunan lintas sektor lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	1. Peningkatan koordiansi dengan Stakeholders terkait, akademisi, masyarakat, dll. 2. Harmonisasi dengan aturan – aturan pusat yaitu berupa kegiatan pertemuan, FGD dan konsultasi	Sasaran pembangunan lintas sektor lingkup bidang Infrastruktur dan kewilayahan dapat berjalan dengan selaras
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
1. Persentase Inovasi Daerah.	1. Dilaksanakan kegiatan yang mendorong terciptanya	1. Fasilitasi Inovasi dapat terlaksana

2. Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah	inovasi-inovasi melalui kegiatan Krenova. 2. Sosialisasi ke Kabupaten/Kota mengenai inovasi	2. Dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun berdasarkan penelitian dan pengembangan
--	--	--

Sesuai dengan perincian tersebut di atas seluruh capaian Program/Kegiatan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2024 telah tercapai sesuai dengan target yang tertuang dalam Renja Tahun 2024 maupun Renstra Tahun 2021-2026.

Hal-hal yang perlu dilakukan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong ke depan adalah:

1. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, berbasis data, dan evidence-based.
2. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan evaluasi Renja, RPJMD, dan RKPD.
3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas perangkat daerah.
4. Meningkatkan kapasitas ASN Bappeda dalam analisis kebijakan, perencanaan teknokratik, dan digitalisasi

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong s/d Tahun 2025 terlihat pada tabel TC-29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
KABUPATEN REJANG LEBONG

BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG

KODE	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Prog (autcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog dan Keg s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
5 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5 01 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5 01 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42 dokumen	21 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	36 dokumen	83%
		Jumlah dokumen Penganggaran Perangkat Daerah	24 dokumen	12 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	20 dokumen	83%
5 01 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60 laporan	30 laporan	10 laporan	10 laporan	100%	10 laporan	40 Laporan	83%
5 01 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%
5 01 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	192 orang	96 orang	32 orang	32 orang	100%	32 orang	156 orang	83%
5 01 01 2 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 dokumen	36 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	0%	12 dokumen	60 dokumen	83%

5	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%
5	01	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	12 orang	0 orang	0 orang	0%	0%	0 orang	0 orang	0%
5	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	18 paket	9 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	15 paket	83%
5	01	01	2	06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 paket	2 paket	0 paket	0 paket	0%	0 paket	2 paket	50%
5	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	24 paket	12 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	20 paket	83%
5	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 paket	18 paket	6 paket	6 paket	100%	6 paket	30 paket	83%
5	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 paket	12 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	20 paket	83%
5	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	10 dokumen	83%
5	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	528 laporan	268 laporan	80 laporan	80 laporan	100%	95 laporan	443 laporan	83%
5	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	01	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 unit	0	0	0	0%	1 unit	1 unit	25%
5	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	0	-	-	100%	1 unit	1 unit	20%
5	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	4 unit	0 unit	0 unit	100%	-	4 unit	100%
5	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

5	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 laporan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	5 laporan	83%
5	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 laporan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	5 laporan	83%
5	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 laporan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	5 laporan	83%
5	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 laporan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	5 laporan	83%
5	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	54 unit	27 unit	9 unit	9 unit	100%	9 unit	45 unit	83%
5	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	1 unit	1 unit	0	0%	1 unit	1 unit	25%
5	01	02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	01	02	2	01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	01	02	2	01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	6 berita acara	3 berita acara	1 berita acara	1 berita acara	100%	1 berita acara	5 berita acara	83%
							Jumlah berita acara Forum Konsultasi Publik dan Forum OPD	12 berita acara	6 berita acara	2 berita acara	2 berita acara	100%	2 berita acara	10 berita acara	83%
5	01	02	2	01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD), PK dan IKU Kabupaten	29 dokumen	14 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	24 dokumen	83%

5	01	02	2	02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	Persentase tingkat ketersediaan data perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	01	02	2	02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	6 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	6 dokumen	83%
5	01	02	2	03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	01	02	2	03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1.272 Laporan	636 laporan	212 laporan	212 laporan	100%	212 laporan	1.060 laporan	83%
5	01	03				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran konsistensi program RKPd ke dalam APBD	83,91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase program Renstra yang selaras dengan program RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase tujuan dan sasaran pada PK yang selaras dengan Renstra	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase program pada Renstra yang selaras dengan Renja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase OPD yang menyusun IKU,PK dan Rencana Aksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	01	03	2	01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	persentase keselarasan antara RKPd dan APBD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	83,91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase program Renstra yang selaras dengan program RPJMD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase tujuan dan sasaran pada PK yang selaras dengan Renstra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase program pada Renstra yang selaras dengan Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

							Persentase OPD yang menyusun IKU, PK dan Rencana Aksi bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	01	03	2	01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, RKPD)	96 dokumen	48 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	100%	16 dokumen	80 dokumen	83%		
5	01	03	2	02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	persentase keselarasan antara RKPD dan APBD bidang perekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam)	83,91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase program Renstra yang selaras dengan program RPJMD bidang Perekonomian dan SDA(Sumber Daya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase tujuan dan sasaran pada PK yang selaras dengan Renstra Bidang Perekonomian dan SDA(Sumber	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase program pada Renstra yang selaras dengan Renja Bidang Perekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase OPD yang menyusun IKU,PK dan Rencana Aksi bidang perekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	01	03	2	02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	54 dokumen	27 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100%	9 dokumen	45 dokumen	83%		
5	01	03	2	03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	persentase keselarasan antara RKPD dan APBD bidang infrastruktur dan kewilayahan	83,91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase program Renstra yang selaras dengan program RPJMD bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase tujuan dan sasaran pada PK yang selaras dengan Renstra Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase program pada Renstra yang selaras dengan Renja Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase OPD yang menyusun IKU,PK dan Rencana Aksi bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	01	03	2	03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	168 dokumen	84 dokumen	28 dokumen	28 dokumen	100%	28 dokumen	140 dokumen	83%		

5	05	02			PROGRAM PENEUTIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan sebagai dasar rumusan kebijakan	27,27%	27,27%	27,27%	27,27%	100%	27,27%	27,27%	100%	
5	05	02	2	04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	persentase inovasi dan daya saing yang mendukung pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
						Persentase ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
							100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	05	02	2	04	01	Penelitian,Pengembangan, dan Perekayasaan Dibidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan Di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	83%
5	05	02	2	04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	6 laporan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	5 laporan	83%

Penjelasan dari tabel T-C 29 adalah sebagai berikut :

- Kolom 4 merupakan kondisi target kinerja capaian pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong 2021-2026.
- Kolom 5 merupakan realisasi kinerja program, kegiatan sampai dengan tahun 2023.
- Kolom 6 merupakan target Renja Bappeda 2024
- Kolom 7 merupakan realisasi pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2024 yang telah dilaksanakan melalui APBD T.A 2024
- Kolom 8 merupakan tingkat realisasi antara realisasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 dibagi target Renja Tahun 2024.
- Kolom 10 merupakan perkiraan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan Tahun 2025.
- Kolom 11 merupakan tingkat capaian realisasi target Renstra yaitu perbandingan antara capaian realisasi target sampai dengan tahun 2025 (tahun berjalan) dengan target akhir Renstra (2026) dalam bentuk persentase.

Untuk realisasi Renja Perangkat daerah n-1 (tahun lalu yaitu tahun 2024) ada beberapa kegiatan dengan tingkat realisasinya rendah atau 0, yaitu:

1. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan tingkat realisasinya 0%

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari:

1. Perencanaan yang matang dan berbasis data serta analisis yang kuat menjadi fondasi utama pencapaian target Renja dan Renstra.
2. Dukungan anggaran yang cukup dan tepat sasaran sangat menentukan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
3. Sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan memiliki integritas tinggi sangat berperan dalam implementasi program dan kegiatan.
4. Data yang akurat dan sistem informasi yang mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi akan meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan.
5. Pelaksanaan monev secara berkala memungkinkan identifikasi permasalahan secara dini serta perbaikan strategi pelaksanaan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sampai tahun 2025 Bappeda Kabupaten Rejang Lebong menyelenggarakan 2 (dua) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yaitu urusan

perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan, selain tugas tersebut, Bappeda Kabupaten Rejang Lebong juga mempunyai fungsi, yaitu:

- Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan
- Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas tugas dilingkungan perencanaan pembangunan daerah.
- Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati

Evaluasi kinerja yang dilakukan berdasarkan penyusunan rencana kerja tahunan dan dokumen serta hasil dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang juga menjadi ukuran keberhasilan dari kinerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dalam penilaian Akuntabilitas kinerja pada tahun 2024.

(T.C 30)
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BAPPEDA
 KABUPATEN REJANG LEBONG**

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2024 (Thn n-2)	Tahun 2025 (Thn n-1)	Tahun 2026 (Thn n)	Tahun 2027 (Thn n+1)	Tahun 2024 (Thn n-2)	Tahun 2025 (Thn n-1)	Tahun 2026 (Thn n)	Tahun 2027 (Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Evaluasi SAKIP OPD			BB	BB	BB	BB	BB	-	BB	BB	
2	Nilai SAKIP Komponen perencanaan kinerja			22,10%	23,27%	22,25%	22,32%	22,10%	-	23,27%	23,77%	
3	Nilai SAKIP Komponen pengukuran kinerja			16,33%	0,00%	0,00%	0,0%	0,00%	-	0,00%	0,00%	
4	Persentase perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam Penerapan inovasi daerah			13%	14,5%	13,0%	70,45%	14,0%	-	11,5%	13,0%	
5	Tingkat pemenuhan data daya saing daerah			86,60%	88,66%	0,00%	0%	86,60%	-	0,00%	0,00%	
6	Persentase inovasi yang terealisasi			100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai beriku:

a. Nilai SAKIP OPD

Nilai SAKIP OPD, indikator ini dinilai oleh Inspektorat dinilai melalui evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan dengan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan dengan menilai keberhasilan pelaksanaan tugas secara keseluruhan, nilai SAKIP Bappeda Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2024 adalah BB (76,49)

b. Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja

Nilai SAKIP Komponen perencanaan kinerja, komponen perencanaan di ukur dari dokumen perencanaan kinerja yang telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran SMART, menggunakan penyelarasan disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain dan, selain itu juga perencanaan kinerja harus dimanfaatkan untuk dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil berkesinambungan capaian kinerja dinilai oleh penilaian Kemen PAN RB, capaian target sebesar 22,10%

c. Nilai SAKIP kompoen pengukuran kinerja pada Tahun 2024 bukan lagi menjadi indikator Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, tetapi menjadi indikator Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong

d. Pada tahun 2024 untuk meningkatkan inovasi perangkat daerah dan lembaga masyarakat, pemerintah daerah menekankan pada daerah untuk melakukan inovasi karena mendorong pelayanan publik, indikator kinerja persentase perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dengan realisasi 14%

e. Indikator kinerja tingkat pemenuhan data daya saing daerah dihitung dari jumlah komponen penilaian data daya saing daerah yang terisi dibagi jumlah keseluruhan komponen penilaian data daya saing daerah di kali 100,dengan realisasi 86,60 %.

f. Persentase inovasi yang terealisasi, inovasi yang dimiliki Bappeda adalah “Dokter Perencanaan” yang berfungsi : koordinasi/konsultasi penyusunan dokumen perencanaan, pendampingan penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan monitoring dokumen perencanaan. Realisasi indikator persentase inovasi yang terealisasi adalah 100%

Faktor keberhasilan capaian kinerja adalah :

1. Adanya dokumen Renstra , RKPD, dan Renja yang disusun berbasis data, evidence-based, serta selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah lainnya.
2. Kompetensi, integritas, dan profesionalisme pegawai Bappeda yang mendukung pelaksanaan tugas secara optimal.
3. Kinerja Bappeda sangat dipengaruhi oleh sejauh mana koordinasi dengan OPD lain, DPRD, serta pemangku kepentingan berjalan efektif.
4. Penggunaan sistem informasi perencanaan pembangunan mempercepat proses kerja dan meningkatkan akurasi perencanaan serta pengawasan.
5. Adanya pengawasan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan tindak lanjut hasil evaluasi mendorong tercapainya target yang telah ditetapkan.
6. Capaian kinerja sangat bergantung pada alokasi dan efisiensi penggunaan anggaran untuk program prioritas.
7. Keterlibatan masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan LSM dalam proses Musrenbang dan penyusunan dokumen perencanaan turut meningkatkan kualitas dan keberhasilan kinerja.
8. Kemampuan Bappeda dalam menghadirkan inovasi perencanaan, serta adaptif terhadap dinamika pembangunan dan regulasi nasional.

Faktor penghambat capaian kinerja adalah:

1. Keterbatasan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menghambat penyusunan dokumen perencanaan berbasis bukti.
2. Jumlah dan kompetensi pegawai yang belum memadai, terutama dalam bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan analisis kebijakan.
3. Tidak sinergisnya program/kegiatan antar OPD menyebabkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Sistem informasi perencanaan belum sepenuhnya terintegrasi dan dimanfaatkan secara maksimal dalam proses perencanaan dan pengendalian.
5. Kurangnya inisiatif dalam menghadirkan inovasi perencanaan serta belum cepat beradaptasi terhadap dinamika kebijakan nasional dan global.
6. Penyusunan dokumen perencanaan tidak sesuai jadwal atau tidak melalui tahapan yang lengkap, sehingga berdampak pada implementasi.

7. Monev yang hanya bersifat administratif dan tidak menghasilkan umpan balik yang dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan/program.
8. Rendahnya pelibatan masyarakat, akademisi, dan sektor swasta menyebabkan perencanaan tidak selalu mencerminkan kebutuhan nyata.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai target:

1. Mengembangkan dan memutakhirkan basis data pembangunan daerah yang terintegrasi
2. Mendorong perencanaan yang berbasis bukti.
3. Melaksanakan pelatihan teknis dan fungsional secara berkala untuk ASN perencana.
4. Menjalin koordinasi yang lebih intensif antar OPD dan instansi vertikal melalui forum lintas sektor, konsultasi publik, Musrenbang, dan sinkronisasi program.
5. Meningkatkan keterlibatan stakeholders dalam proses perencanaan.
6. Meningkatkan ketepatan waktu dan kualitas penyusunan perencanaan (RKPD, Renstra, Renja, RKA).
7. Melakukan monev secara berkala dan menyusun laporan capaian kinerja dengan mengidentifikasi hambatan serta tindak lanjutnya.
8. Menyelaraskan perencanaan dengan agenda reformasi birokrasi dan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
9. Menyusun program prioritas dengan pendekatan money follow program dan money follow function.
10. Mendorong peran aktif masyarakat dalam perencanaan melalui forum Musrenbang, FGD tematik, dan konsultasi publik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong adalah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pununjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Sebagai perangkat daerah dengan fungsi:

- a. Merumuskan, menyusun kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

b. Mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dan pembinaan operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

c. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan serta pembinaan administrasi kepegawaian dilingkungan Badan

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai perencana pembangunan daerah, Bappeda bertanggungjawab dalam merumuskan strategi pembangunan daerah sekarang dan kedepannya dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 disamping memperhatikan kondisi riil daerah dan juga kebutuhan maupun aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan daerah.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Bappeda, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Bappeda selaku koordinator perencanaan pembangunan dalam melaksanakan amanat peraturan perundangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam penyusunan Renja perlu direncanakan secara matang. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan berbagai hambatan/permasalahan yang dihadapi terkait dengan penyelenggaraan dan fungsi bappeda, meliputi:

- a. Belum optimalnya pencapaian komponen perencanaan pada penilaian SAKIP Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Belum optimalnya integrasi sistem perencanaan dengan penganggaran.
- c. Belum optimalnya sinergisitas program dan kegiatan daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan.
- d. Belum optimalnya koordinasi dan sinergisitas antar stakeholders dalam perumusan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- e. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian, riset dan inovasi sebagai acuan perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Adapun tantangan yang dihadapi Bappeda khususnya di Tahun 2026 mendatang antara lain :

- a. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur supaya bisa mengikuti arus perkembangan regulasi yang ada.
- b. Capaian pembangunan daerah belum berdampak secara optimal dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah.

- c. Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas antar stakeholder dalam perumusan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- d. Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian, riset dan inovasi pada masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026. Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan menganalisa rancangan awal RKPD Kabupaten Rejang Lebong dibandingkan dengan hasil analisa kebutuhan yang bertujuan untuk menyelaraskan sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Rejang Lebong. Penyempurnaan Rancangan awal Renja mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

Program dan kegiatan yang ada pada Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong mengalami perubahan terkait nomenklatur terbaru dan disesuaikan dengan Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029. Namun perubahan terhadap besarnya pagu indikatif atau besarnya jumlah anggaran yang diusulkan untuk membiayai rencana kegiatan.

Berdasarkan rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026.

Rumusan program dan kegiatan antara rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan adanya penambahan program yaitu program riset dan inovasi, kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dan sub kegiatan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, dan ada perbedaan anggaran antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan antara lain:

1. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota adanya penambahan anggaran rapat dan koordinasi dengan perangkat daerah se-Kabupaten Rejang Lebog
2. Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota adanya penambahan anggaran rapat
3. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adanya penambahan anggaran rapat.

4. Monitoring evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah adanya penambahan untuk anggaran rapat.
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD), penambahan anggaran rapat dan koordinasi dengan mitra bidang.
6. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD), penambahan anggaran rapat dan koordinasi dengan mitra bidang.
7. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), penambahan anggaran rapat teknis dan rapat pokja
8. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, adanya penambahan anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi IID dan IDSG
9. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan, adanya penambahan anggaran untuk penyelenggaraan lomba inovasi daerah dan cetak buletin.
10. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan pengkajian, dan penerapan, adanya penambahan sub kegiatan karena penyesuaian dengan nomenklatur.
11. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, penambahan anggaran karena penyesuaian dengan harga barang.
12. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penambahan anggaran karena penyesuaian jumlah ASN dan P3K
13. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, penambahan anggaran karena penyesuaian anggaran.
14. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, penambahan anggaran karena penyesuaian dengan harga barang
15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, adanya penambahan jumlah koordinasi
16. Pengadaan Mebel, adanya penambahan anggaran karena penambahan jumlah barang berdasarkan usulan RKBMD
17. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya, adanya penambahan anggaran karena penambahan jumlah barang berdasarkan usulan RKBMD
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, penambahan anggaran karena adanya penambahan jumlah kendaraan dinas

Terkait penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026, dilakukan review terhadap Rancangan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

TABEL T.C 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
KABUPATEN REJANG LIBONG

BAPPIDA KABUPATEN REJANG LIBONG

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				1.977.000.000					1.817.110.850	
	PERENCANAAN				1.442.000.000					1.521.110.850	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kabupaten RL	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100 persen	580.000.000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	Kabupaten RL	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100 Persen	1.152.041.950	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kabupaten RL	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pendanaan	100 persen	400.000.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kabupaten RL	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	877.814.250	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Kota	Kabupaten RL	Jumlah berita acara Musrenbang Kabupaten Kota	3 berita acara	200.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Kota	Kabupaten RL	Jumlah berita acara Musrenbang Kabupaten Kota	3 berita acara	421.997.000	Penyesuaian anggaran
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten RL	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	5 Dokumen	200.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten RL	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota yang ditetapkan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	5 Dokumen	455.817.250	Penyesuaian anggaran
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kabupaten RL	Persentase tingkat ketersediaan dokumen analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan	100 persen	100.000.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	Kabupaten RL	Persentase ketersediaan dokumen analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan	100 persen	97.923.450	

Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kabupaten RL	Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 dokumen	100.000.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kabupaten RL	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)	3 dokumen	97.923.450	Penyesuaian anggaran
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kabupaten RL	Presentase ketersediaan dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100 persen	80.000.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kabupaten RL	Presentase ketersediaan dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100 persen	176.304.250	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kabupaten RL	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	212 laporan	80.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan	Kabupaten RL	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	212 laporan	176.304.250	Penyesuaian anggaran
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kabupaten RL	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	83,91 Persen	862.000.000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kabupaten RL	Presentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan	100%	369.068.900	
		Presentase program Renstra yang selaras dengan program RPJMD	100%				Presentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%		
		Presentase program pada Renstra yang selaras dengan Renja	100%				Presentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA	100%		
		Presentase tujuan dan sasaran pada PK yang selaras dengan	100%							
		Presentase OPD yang menyusun PK	100%							
		Presentase OPD yang menyusun Rencana Aksi	100%							
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kabupaten RL	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD Bidang Sosial Pelayanan Dasar	83,91%	287.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kabupaten RL	Presentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	100%	119.097.100	
		Presentase program Renstra yang selaras dengan program RPJMD Bidang Sosial Pelayanan Dasar	100%				Presentase laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	100%		

			Persentase program pada Renstra yang selaras dengan Renja Bidang Sosial Pelayanan Dasar	100%				Persentase laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan dan	100%		
			Persentase anggaran pada PK yang selaras dengan Renstra Bidang Sosial Pelayanan Dasar	100%				Persentase laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Bidang Pemerintahan dan	100%		
			Persentase OPD yang menyusun PK Bidang Sosial	100%							
			Persentase OPD yang menyusun Rencana Aksi Bidang Sosial Pelayanan Dasar	100%							
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kabupaten RL	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16 dokumen	287.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kabupaten RL	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16 dokumen	119.097.100	Penyesuaian anggaran
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kabupaten RL	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha	100 persen	287.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kabupaten RL	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	100%	107.130.600	
			Persentase program Renstra yang selaras dengan program RPJMD Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha	83,91 persen				Persentase laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	100%		
			Persentase program pada Renstra yang selaras dengan Renja Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha	100%				Persentase laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian dan SDA	100%		
			Persentase anggaran pada PK yang selaras dengan Renstra Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha	100%				Persentase laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD bidang perekonomian dan SDA	100%		

			Persentase OPD yang menyusun PK Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha	100%							
			Persentase OPD yang menyusun Rencana Aksi Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha	100%							
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kabupaten RL		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 dokumen	287.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kabupaten RL	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir penyusunannya	9 dokumen	107.130.600	Penyesuaian anggaran
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Kabupaten RL		Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang	83,91 persen	288.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Kabupaten RL	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan	100%	142.941.200	
			Persentase program Renstra yang selaras dengan program RPJMD Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang	100%				Persentase laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	100%		
			Persentase program pada Renstra yang selaras dengan Renja Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang	100%				Persentase laporan hasil sintensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur dan	100%		
			Persentase sasaran pada PK yang selaras dengan Renstra Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang	100%				Persentase laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD bidang infrastruktur dan	100%		
			Persentase OPD yang menyusun PK Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang	100%							
			Persentase OPD yang menyusun Rencana Aksi Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang	100%							
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kabupaten RL		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28 dokumen	288.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kabupaten RL	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD	28 dokumen	142.941.200	Penyesuaian anggaran

	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				535.000.000					296.000.000	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kabupaten RL	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan sebagai dasar rumusan kebijakan	27,27 Persen	535.000.000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kabupaten RL	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	100%	176.000.000	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kabupaten RL	Persentase inovasi dan daya saing yang mendukung pembangunan daerah	100 persen	535.000.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kabupaten RL	Persentase Pengembangan inovasi dan Teknologi yang terlaksana	100 persen	176.000.000	
			Persentase ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan	100 persen							
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kabupaten RL	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen	135.000.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kabupaten RL	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen	80.000.000	Penyesuaian anggaran
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kabupaten RL	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	1 laporan	400.000.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kabupaten RL	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	1 laporan	96.000.000	Penyesuaian anggaran
						PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Kabupaten RL	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	29,63%	120.000.000	
						Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan penerapan	Kabupaten RL	Persentase penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan yang terlaksana	100%	120.000.000	
						Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Kabupaten RL	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	4 laporan	120.000.000	Penyesuaian Nomenklatur

NON URUSAN				4.299.342.963						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				4.299.342.963						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten RL	Persentase pelayanan administrasi perkhantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100 persen	4.299.342.963	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten RL	Persentase pelayanan administrasi perkhantoran yang akuntabel dan tepat	100 persen	4.644.941.193,80	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten RL	Persentase ketertarikan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	40.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten RL	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100 persen	45.878.100	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten RL	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	9 dokumen	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten RL	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 dokumen	23.682.550	Penyesuaian dengan standar harga barang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten RL	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten RL	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 laporan	22.195.550	penyesuaian dengan standar harga barang
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten RL	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 persen	3.528.731.122,71	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten RL	Persentase administrasi keuangan yang terselenggarakan dengan	100 persen	3.772.250.214	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten RL	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32 orang/bulan	3.395.131.122,71	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten RL	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	43 orang/bulan	3.637.130.213,80	Penyesuaian jumlah ASN dan P3K
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten RL	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	135.600.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten RL	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	135.120.000	Penyesuaian anggaran
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten RL	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	10.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten RL	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian yang tepat	100 persen	10.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten RL	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	2 orang	10.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten RL	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	2 orang	10.000.000	sesuai

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten RL	Persentase layanan umum perangkat daerah sesuai standar	100 persen	368.856.092	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten RL	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 persen	306.117.940	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten RL	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 paket	9.515.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten RL	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 paket	9.532.000	Penyesuaian dengan standar harga barang
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten RL	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	8.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten RL	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	-	Belanja diartikan dengan Sub Kegiatan peralatan dan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten RL	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	19.643.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten RL	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang	3 paket	11.098.540	efisiensi belanja
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten RL	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 paket	22.218.092	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten RL	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	27.278.000	Penyesuaian dengan standar harga barang
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten RL	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4 paket	15.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten RL	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4 paket	22.426.400	Penyesuaian dengan standar harga barang
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten RL	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	14.480.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten RL	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	33.880.000	Penambahan jasa iklan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten RL	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	96 laporan	230.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten RL	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 laporan	201.903.000	efisiensi anggaran
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten RL	Jumlah dokumen penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	50.000.000						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten RL	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100 persen	26.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten RL	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang	100 persen	224.216.440	
Pengadaan Mebel	Kabupaten RL	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 unit	6.000.000	Pengadaan Mebel	Kabupaten RL	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	20.854.000	penambahan jumlah barang berdasarkan usulan RKMD
Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kabupaten RL	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kabupaten RL	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	14 unit	203.362.440	penambahan jumlah barang berdasarkan usulan RKMD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten RI	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam kendaraan baik	100 persen	173.353.748	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten RI	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	136.770.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten RI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten RI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	5.000.000	sesuai
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten RI	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	130.553.748	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten RI	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	111.390.000	efisiensi anggaran
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten RI	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	17.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten RI	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	20.380.000	penambahan jumlah barang yang diperbaiki
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten RI	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	20.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten RI	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	-	penganggaran di pindahkan ke sub kegiatan - penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten RI	Persentase sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	100 persen	152.402.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten RI	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan	100 persen	149.708.500	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten RI	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 unit	129.302.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten RI	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 unit	149.708.500	penambahan jumlah kendaraan dinas dan menyesuaikan standar biaya masukan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten RI	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	29.100.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten RI	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	-	efisiensi anggaran
Jumlah				6.276.342.962,71					6.462.052.043,80	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom –up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi–asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah Kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten. Dalam bagian ini diuraikan kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan provinsi, LSM asosiasi–asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang ditujukan langsung kepada perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah, provinsi, dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan/kabupaten yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah dan mengakomodasi usulan sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat daerah.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dibahas dalam pembahasan Forum Perangkat daerah Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang pada tingkat kecamatan. Untuk penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 tidak memiliki usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berasal dari masyarakat maupun DPRD Kabupaten Rejang Lebong untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan termasuk hasil forum perangkat daerah dan lintas perangkat daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan
Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Rejang Lebong

Nama Perangkat Daerah: Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG

3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja yang disusun perangkat daerah berpedoman pada RKPD dan kebijakan nasional. Sesuai arahan RPJMN 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang berfokus pada:

- Penurunan kemiskinan
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- Pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan
- Diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan

Arah kebijakan pembangunan nasional akan berpedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua pencapaian sasaran dan prioritas serta program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai Tema RKP Tahun 2026 “Kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif”.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan Tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

- 1 PN1 Memperkokoh ideology Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
- 2 PN2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui Swasembada pangan, energi, air ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau
- 3 PN3 Meningkatkan Lapangan Kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan Agromaritim Industri di sentra Produksi melalui peran aktif koperasi Melanjutkan pengembangan Infrastruktur
- 4 PN4 Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milineal

dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas

- 5 PN5 Melanjutkan hilisasi dan mengembangkan industry berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
- 6 PN6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
- 7 PN7 Memperkuat Reformasi Politik,hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan
- 8 PN8 Memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Tujuan dan sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran dari Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Perumusan tujuan menjabarkan hal-hal yang dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu-isu strategis yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong . Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Berikut tujuan Rencana Kerja berdasarkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualiatas perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatnya peran riset dan inovasi daerah dalam mendukung pembangunan daerah.

Tujuan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini kemudian dijabarkan ke dalam sasaran strategis Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sasaran merupakan hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam

kurun 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan, berikut sasaran jangka menengah berdasarkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029:

1. Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah.
2. Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan daerah.
3. Meningkatnya penerapan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah

3.3. Program dan Kegiatan

- a. Faktor –faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026 disusun dengan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja perangkat daerah tahun 2024, Selain itu, hasil capaian indikator sasaran kinerja tersebut telah selaras dengan indikator kinerja yang tertunag dalam Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029, baik sebagai indikator utama maupun pendukung berpedoman pada hasil pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90.1.15.5-1317.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana diuraikan diatas maka diperlukan rumusan program/kegiatan. Dalam merumuskan program/kegiatan Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya antara lain:

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 yakni dengan visi’’Mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong yang Maju, Mandiri, Berakhlak dan berkelanjutan’’
2. Mendukung pencapaian 17(tujuh belas) tujuan *Sustainable Development Goal's* (SDG's). Dimana Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dalam merumuskan Rencana Kerja Tahun 2026 berpedoman pada indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi ke dalam dokumen renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan.
4. Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan.
5. Pencapaian NSPK dan SPM, Program dan kegiatan diintegrasikan dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk itu NSPK merupakan pedoman bagi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Mengintegrasikan NSPK ke dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD) dan memastikan perangkat daerah memahami dan menerapkan NSPK sesuai bidang urusan.

b. Secara garis besar rumusan program/kegiatan Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026, program dan kegiatan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 yakni “Mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong yang Maju, Mandiri, Berakhlak, dan Berkelanjutan”
2. Program/kegiatan pada Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam kerangka perumusan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dalam Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 melaksanakan 2 urusan (urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan), 5 program 15 kegiatan dan 25 subkegiatan, jumlah total pagu indikatif Rp. 6.462.052.043,80 yang bersumber dari APBD dengan alokasi terpusat di Kabupaten Rejang Lebong.

Berikut disajikan pada tabel TC. 33 rumusan rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 sebagai berikut :

Tabel TC 33

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. REJANG LEBONG
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						6.462.052.043,00							7.377.035.743,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						6.462.052.043,00							7.377.035.743,00	
	5.01	PERENCANAAN						6.166.052.043,00							7.377.035.743,00	
1	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akurat dan tepat waktu	-			100 persen	4.644.941.193,00						-	5.050.835.743,00	
		[Meningkatkan tata kelola pemerintah pada BAPPEDA]	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akurat dan tepat Waktu	100	100	100	100	4.644.941.193,00	-	-	-	-			5.050.835.743,00	-
	5.01.01.2.01	Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun				100 persen	45.870.000,00			Memperkuat informasi politik fiskal dan birokrasi, serta meng- kuat peng- awasan dan pembertan- aan korupsi, narkoba, judi dan pe- nyukupan	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem- erintahan		-	48.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	23.602.500,00	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat informasi politik fiskal dan birokrasi, serta meng- kuat peng- awasan dan pembertan- aan korupsi, narkoba, judi dan pe- nyukupan	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem- erintahan			25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Renstrasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN REJUA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJUA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SAP/2 dan Laporan Harus Kelembagaan/Perencanaan Laporan Capaian Kinerja dan Wawancara Kinerja SAP/2				5 Laporan	27.130.550,00	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi perekonomian, pemerataan sifatnya menjadi penguat pertumbuhan dan pemerataan aneka komoditas, padi, dan per- mukiman	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem- erintahan			23.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terseleksi/terdaftar dengan baik				100 persen	3.772.250.213,00							4.205.252.240,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	3.637.130.213,00	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					4.270.137.240,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	133.120.000,00	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					133.120.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian yang tepat akurasi				100 persen	10.000.000,00							20.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	10.000.000,00	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					20.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase persentase administrasi umum perangkat daerah				100 persen	206.117.940,00							211.880.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	9.532.000,00	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					10.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	11.098.540,00	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					21.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENJARA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARJETA RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.06.0004	Pengadaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	27.270.000,00	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					23.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	22.426.400,00	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					18.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Pengadaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	33.880.000,00	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					33.880.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	201.803.000,00	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					201.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Persewaan Utusan Pemerintah Daerah	Persewaan persewaan barang milik daerah persewaan utusan pemerintah daerah yang input Akut													
							100 person	224.216.440,00							179.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	20.854.000,00	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					12.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	203.382.440,00	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					142.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Pengadaan Jasa Penunjang Utusan Pemerintahan Daerah	Persewaan persewaan jasa penunjang utusan pemerintahan daerah													
							100 person	136.770.000,00							136.880.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Pengadaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	111.390.000,00	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					111.380.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSITRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PERANGKUP JAWAB
							TARGET 2025	PACU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PACU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor yang Dibutuhkan				1 Laporan	20.380.000,00	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	20.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemerintahan Bersang Muka Daerah Perangung Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah perorang urusan pemerintahan yang beroperasi dengan baik				100 persen	149.708.500,00			-	-	-	-	149.708.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	149.708.500,00	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	149.708.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGELOMPOKAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RPJMD dengan RRPD	-			100 persen	1.152.041.950,00						-	1.378.000.000,00	
		[Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah]	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase Keselarasan RPJMD dengan RRPD	100	100	100	100	1.152.041.950,00						-	1.378.000.000,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan yang disusun				100 Persen	872.814.250,00			Memperkuat informasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pemerintahan dan pembangunan keadilan, judi, dan pelayanan	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah, Masyarakat		1.031.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Penyusunan Monev Kabupaten Kota														
			Jumlah Benda Aset Monev Kabupaten Kota				3 Benda Aset	421.997.000,00	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat informasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pemerintahan dan pembangunan keadilan, judi, dan pelayanan	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah, Masyarakat		531.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.02.2.01.0007		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RP/RKAS/RKPD/KORIS)				5 Dokumen	455.817.250,00	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pemerintahan dan pemberantasan korupsi markasda, jadi dan pe- nyelidupan	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem- erintahan	Perangkat Daerah, Masyarakat		500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENGANGKUTAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase/ ketersediaan hasil analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah				100 persen	97.923.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pemerintahan dan pemberantasan korupsi markasda, jadi dan pe- nyelidupan	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem- erintahan	Setelah dokumen perencanaan pembangunan daerah		124.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENGANGKUTAN DAERAH
5.01.02.2.02.0001		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				3 Dokumen	97.923.450,00	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pemerintahan dan pemberantasan korupsi markasda, jadi dan pe- nyelidupan	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem- erintahan	Setelah dokumen perencanaan pembangunan daerah		124.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENGANGKUTAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PADU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PADU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah				100 persen	176.304.250,00			Memperkuat informasi politik, hukum dan birokrasi, serta meng- erkuat peran dan pemerintah dan kegiatan masyarakat, jukl, dan pe- nyelamatan .	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem- erintahan	Perangkat Daerah Se. Kabupaten Rejang Lebong		223.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Laporan Berbasis Petakswatan Pembangunan Daerah																
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				40 Laporan	176.304.250,00	Kab. Rejang Lebong, Sumus Kecamatan Sumus Kel. Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat informasi politik, hukum dan birokrasi, serta meng- erkuat peran dan pemerintah dan kegiatan masyarakat, jukl, dan pe- nyelamatan .	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem- erintahan	Perangkat Daerah Se. Kabupaten Rejang Lebong		223.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RKPD dengan Renc perangkat daerah pada Bidang Perencanaan dan SDA(Sumber Daya Alam)				100 persen	369.068.900,00							948.200.000,00	
		[Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia]	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renc PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100	100	369.068.900,00							948.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REINSTR OPD	REALISASI CAPAIAN REINJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REINJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.01	Koordinasi Pemantauan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang dikuatkan petyusunannya Persentase laporan hasil audit/evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase laporan monitoring dan evaluasi petyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase laporan hasil sertifikasi kematangan/terjaga dengan RKPD/RPJMD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia				100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	119.092.100,00			Mempertika Informasi politik, hukum dan birokrasi, serta meng kuat peng egahan dan pemerintah aman korupsi, merekaba, jati dan pe nyeludupan	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem intahan	Perangkat Daerah, Mangrove		315.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikuatkan Petyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				16 Dokumen	119.092.100,00	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertika Informasi politik, hukum dan birokrasi, serta meng kuat peng egahan dan pemerintah aman korupsi, merekaba, jati dan pe nyeludupan	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem intahan	Perangkat Daerah, Mangrove		315.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		[Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam]	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100	100	100	100	309.968.900,00							948.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / DUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSIRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang akomodasi pembangunan Persentase laporan hasil analisis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase laporan hasil selengkapnya Rencana Kerja dengan RKPD/RPD bidang perekonomian dan SDM Persentase laporan monitoring dan evaluasi pembangunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	107.130.000,00			Mempakai Informasi pola, tutum dan birokrasi, serta meng ekuit peng egeben dan pemerant asan knapu narkaba, jati, dan pe nyelakapan	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Pengikut Daerah, Masyarakat		315.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMANGGUPAN DAERAH
5.01.03.2.02.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RP, RPD, RPD, RPD dan RPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Akomodasi Pembangunan (RP, RPD, RPD, RPD dan RPD)				9 Dokumen	107.130.000,00	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALURAN UMUM (DAU)	Mempakai Informasi pola, tutum dan birokrasi, serta meng ekuit peng egeben dan pemerant asan knapu narkaba, jati, dan pe nyelakapan	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Pengikut Daerah, Masyarakat		315.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMANGGUPAN DAERAH
		[Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan]	Persentase Keseluruhan RKPD dengan Renta PD pada bidang infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	100	100	369.088.900,00							948.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan yang diketahui persentasenya Persentase laporan hasil akademik penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan Persentase laporan hasil senkronisasi RENCANA dengan RUP/REDA bidang infrastruktur dan kewilayahan Persentase laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan				100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	142.843.230,00			Memperkuat 1 reformasi politik, hukum dan ekonomi, serta meningkatkan pemerintahan dan pemerintah aspek keuangan, masyarakat, jasa, dan per nyelidupan -	4. Inovasi dan Tata Kelola Per encanaan	Perangkat Daerah, Masyarakat		316.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	3.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RUP/REDA, RUPMD dan RKPJ)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Diketahui Persentasenya (RUP/REDA, RUPMD dan RKPJ)				28 Dokumen	142.843.230,00	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat 1 reformasi politik, hukum dan ekonomi, serta meningkatkan pemerintahan dan pemerintah aspek keuangan, masyarakat, jasa, dan per nyelidupan -	4. Inovasi dan Tata Kelola Per encanaan	Perangkat Daerah, Masyarakat		316.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						256.000.000,00							390.000.000,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan				100 persen	176.000.000,00							230.000.000,00	
		[Meningkatkan pemanfaatan hasil kegiatan dalam perencanaan pembangunan]	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	100	100	100	100	176.000.000,00							230.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRADA OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRADA TAHUN 2024	PRAKTIK CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKTIK MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan inovasi dan Teknologi yang terkaksana				100 persen	176.000.000,00			Memperkuat informasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah, Masyarakat		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Penyebarluasan di Bidang Teknologi dan Inovasi																
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Penyebarluasan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	80.000.000,00	Rab. Regang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat informasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah, Masyarakat		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Keltisbang																
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Hasil Keltisbang				1 Laporan	96.000.000,00	Rab. Regang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat informasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah, Masyarakat		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	-			29,63 persen	120.000.000,00						-	160.000.000,00	
		[Meningkatkan pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan]	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	100	100	100	100	120.000.000,00						-	160.000.000,00	
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penetapan	Persentase penelitian, pengembangan, pengkajian dan penetapan yang terkaksana				100 persen	120.000.000,00				4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah, Masyarakat		160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY		TARGET	PAU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5.05.03.2.01.0001	Perencanaan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan															
		Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan				4 Laporan	120.000.000,00	Kab. Rijang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Perangkat Daerah, Masyarakat		120.000.000,00	DAN PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH		
		J U M L A H					5.462.952.943,89							1.767.335.745,09			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Bab IV focus perhatiannya adalah terkait rencana kerja dan pendanaan tahun 2026.

Rencana kerja dan pendanaan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025. Diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2026.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 terdapat 5 (lima) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan, baik program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Berikut program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026:

Program, Kegiatan dan Subkegiatan utama yang mendukung pemenuhan visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah daerah:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

- a). Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupate/Kota.
 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota
 - b). Analisis data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
 - c). Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan daerah
 - Monitoring evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah
- a). Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - b). Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - c). Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
3. Program penelitian dan pengembangan daerah
- a). Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.
 - Sosialisasi dan Desiminasi hasil- hasil Kelitbangan

Program dan Kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - b). Administrasi Keuangan Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c). Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- d). Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyediaan bahan logistik kantor.
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan .
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- e).Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
- f).Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- g).Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.

Dalam mendukung prioritas pembangunan yang tertuang dalam rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026, rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai lingkup tugasnya.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja program (outcome)/kegiatan(output) Bappeda Kabupaten Rejang Lebong tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3 tabel TC 33. Rumusan rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun 2027 Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran dari Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi Renja Tahun berjalan. Kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Bappeda Tahun 2026 disusun mengacu kepada Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menyusun program/kegiatan pembangunan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Bappeda Kabupaten Rejang Lebong. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Untuk selanjutnya apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Renhir Renja dengan tetap berpedoman pada pertauran perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Kaidah- kaidah Pelaksanaan.

Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional pelaksanaan Renja Tahun 2026 Renja perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara fungsi yang penting dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen beserta

seluruh staf Bappeda Kabupaten Rejang Lebong sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa mendatang

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut dari dokumen Rencana Kerja Bappeda Kabupaten rejang Lebong Tahun 2026 adalah menjadi pedoman/acuan bagi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi dengan tetap mempertimbangkan prioritas-prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaanya. Program dan kegiatan pada Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Bappeda serta peran aktif Stakeholders.

Dengan disusunnya Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 ini diharapkan dapat mewujudkan suatu konsistensi dan keselarasan antara perencanaan pembangunan dan penganggaran serta tindak lanjut kedepan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi ukuran keberhasilan seluruh program kegiatan yang dilakukan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026.

Curup, Juli 2025

Plt. KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN REJANG LEBONG


AFREDA ROTUA PURBA, S.Hut., M.Ling
Pembina TK I
Nip. 19790430 200212 2 002